

ABSTRAK

Penyebaran Covid-19 di seluruh dunia mengakibatkan timbulnya kebijakan berkaitan dengan penerimaan jamaah haji dan umroh. Terhadap jamaah yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dengan diundangkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Penghentian Kegiatan Haji 2021 Terhadap Kegiatan Perjalanan Haji dan Umroh berdampak terhadap pembatalan ibadah haji dan umrah pada tahun 1443 H 2021 M. PT Galatama Nusantara Tour and Travel memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta merugikan konsumen. Terdapat perjanjian kerjasama antara PT Galatama Nusantara dengan PT Kanomas akibat adanya pembatalan keberangkatan haji dan umroh terlebih adanya regulasi berkaitan dengan penjadwalan ulang dan pengembalian dana BIPIH calon jamaah haji dan umroh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ibadah umroh menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 dan akibatnya terhadap pelaksanaan perjanjian antara PT Kanomas dengan PT Galatama. Serta untuk menganalisis akibat dari sebelum dan sesudah diberlakukannya Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 terhadap pelaksanaan perjanjian PT Kanomas dengan PT Galatama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis empiris, spesifikasi penelitian analisis deskriptif, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Kemudian metode analisa data menggunakan pendekatan kualitatif dengan penalaran induktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umroh menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 dan akibatnya terhadap pelaksanaan perjanjian antara PT Kanomas dengan PT Galatama dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umroh dengan Nomor Registrasi D/733 Tahun 2013. Akibat dari sebelum dan sesudah diberlakukannya Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Akibat hukum dari adanya Covid-19 dikatakan sebagai *hardship* yang mana dalam hal ini perlu diatur untuk pelaksanaan negosiasi dalam suatu perjanjian apabila terjadi keadaan sulit.

Keywords: Pembatalan Ibadah Haji dan Umroh, Perjanjian, Biro Perjalanan Haji dan Umroh

ABSTRAK

The spread of Covid-19 throughout the world has resulted in policies relating to the acceptance of pilgrims and Umrah pilgrims. For pilgrims who will be departed for Saudi Arabia with the promulgation of Decree of the Minister of Religion Number 660 of 2021 concerning Termination of Hajj Activities 2021 Regarding Hajj and Umrah Travel Activities it has an impact on canceling the Hajj and Umrah pilgrimages in 1443 H 2021 M. PT Galatama Nusantara Tour and Travel has a responsibility responsibility to protect consumers in the event of things that are not desirable and harm consumers. There is a cooperation agreement between PT Galatama Nusantara and PT Kanomas as a result of the cancellation of Hajj and Umrah departures, especially with regulations relating to rescheduling and refunding of BIPIH funds for prospective Hajj and Umrah pilgrims.

This study aims to find out and analyze the implementation of the Umrah pilgrimage according to Minister of Religion Regulation Number 6 of 2021 and the consequences for the implementation of the agreement between PT Kanomas and PT Galatama. As well as to analyze the consequences before and after the enactment of the Decree of the Minister of Religion Number 660 of 2021 on the implementation of the agreement between PT Kanomas and PT Galatama. The approach method used in this study is empirical juridical, research specification descriptive analysis, sources and types of data using primary data and secondary data. The data collection method is in the form of field studies through interviews and observation and literature studies. Then the data analysis method uses a qualitative approach with inductive reasoning.

The results of the research show that the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimage according to Minister of Religion Regulation Number 6 of 2021 and the consequences for the implementation of the agreement between PT Kanomas and PT Galatama was carried out based on the provisions of Article 3 to carry out the Hajj and Umrah pilgrimage with Registration Number D/733 of 2013. Consequences before and after the enactment of Decree of the Minister of Religion Number 660 of 2021 referring to Law Number 8 of 2019 and Regulation of the Minister of Religion Number 8 of 2018. The legal consequences of the existence of Covid-19 are said to be a hardship which in this case needs to be regulated for the implementation of negotiations in an agreement in the event of difficult circumstances.

Keywords: Cancellation of Hajj and Umrah Worship, Agreement, Hajj and Umrah Travel Bureau